



RESPONSIBLE SOURCING

PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO)
2022

Pendahuluan

PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sebagai badan usaha menyadari arti pentingnya proses pengadaan Barang/Jasa dan keberlangsungan Perusahaan secara berkesinambungan. Pengadaan Barang/Jasa bukan hanya mengejar pemenuhan kebutuhan Barang/Jasa Perusahaan namun juga harus tepat spesifikasi, harga dan pengiriman.

Tujuan pengadaan adalah dapat memperoleh Barang/Jasa yang tepat dari beberapa aspek, yaitu kualitas, volume, waktu, harga dan lokasi serta dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan mendorong Pengadaan Berkelanjutan serta aspek yang berkaitan dengan Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH).

Proses pengadaan di PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) memperhatikan beberapa prinsip-prinsip yaitu efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil, wajar serta akuntabel. Selain itu, dalam pengadaan Barang/Jasa, diperlukan etika dasar untuk para pihak dalam melaksanakan proses pengadaan. Unit pengadaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dalam melaksanakan setiap proses pengadaan harus memperhatikan etika pengadaan, antara lain:

Introduction

PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero) realizes the importance of the procurement process of goods/services and sustainability on an ongoing basis. The procurement of goods/services is not only pursuing the fulfillment of the needs of the company's goods/services but also must be the right in terms of specifications, prices, and delivery.

The purpose of the procurement is to obtain goods/services from several aspects, namely quality, volume, time, price, and location as well as to increase the use of domestic products and encourage Sustainable Procurement as well as aspects related to Occupational Health, Safety, and Environment.

The procurement process at PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero) pays attention to several principles, as such as efficient, effective, competitive, transparent, fair, and accountable. In addition, in the procurement of goods/services, basic ethics are needed for the parties involved in the procurement process. The procurement unit of PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero) carrying out each procurement process must pay attention to procurement ethics, including:



Pendahuluan

1. Melaksanakan tugas secara tertib dan disertai rasa tanggung jawab;
2. Menghindari setiap peluang adanya penyalahgunaan kewenangan dan jabatan untuk kepentingan pribadi dan kelompok;
3. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan;
4. Melaporkan kepada pihak-pihak berwenang di Perusahaan apabila terjadi penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain;
5. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
6. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis Para Pihak;
7. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Perusahaan dalam Pengadaan;
8. Tidak menerima pemberian hadiah dari penyedia dalam bentuk apapun/menjanjikan apapun kepada Penyedia.

Introduction

1. Avoid any opportunity for abuse of authority and position for personal and group interests;
2. Work professionally and independently, and maintain the confidentiality of procurement documents;
3. Reporting to the authorities in the Company in the event of abuse of office and position for personal, group, or other party's gain;
4. Do not influence each other, either directly or indirectly, resulting in unfair competition;
5. Accept and be responsible for all decisions made by the written agreement of the Parties;
6. Avoiding and preventing the occurrence of waste and leakage of the Company's finances in the Procurement;
7. Do not accept gifts from the Suppliers in any form/promise anything to the Suppliers.



Persyaratan Penyedia

1. Kepatuhan

Setiap Penyedia wajib mematuhi ketentuan Tata Kelola yang berlaku di PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) antara lain :

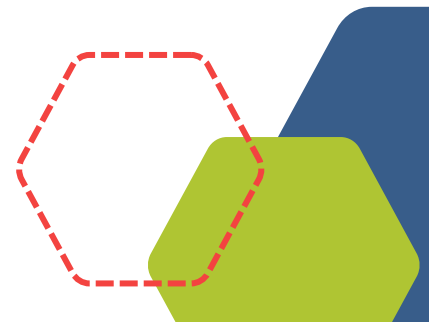
1. Penyedia tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan/atau tindakan yang terkait dengan Penyuapan (*Anti-Bribery*) kepada siapapun dan Tindakan Pencucian Uang (*Money Laundering*) yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa;
2. Penyedia bersedia melaporkan kepada otoritas berwenang PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau pihak berwajib apabila mengetahui adanya indikasi tindakan KKN dan/atau Penyuapan (*Anti-Bribery*) dalam proses pengadaan;
3. Penyedia tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan dan peraturan internasional yang relevan dengan barang dan jasa;
4. Penyedia dilarang menawarkan atau memberi atau setuju untuk memberi hadiah, komisi, rabat atau bentuk lainnya kepada Karyawan atau Pejabat PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero).

Supplier Requirement

1. Compliance

Each Supplier is required to comply with the applicable Governance provisions at PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero), including:

1. The supplier will not practice Corruption, Collusion, Nepotism and/or actions related to Anti-Bribery to anyone and Money Laundering Actions that are known or reasonably suspected or related to the procurement of goods and services;
2. Supplier is willing to report to the competent authority of PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero), the authorities if they know of any indications of corruption and/or Anti-Bribery in the procurement process;
3. Supplier complies with international laws and regulations relevant to goods and services;
4. Supplier is prohibited from offering or giving or agreeing to give gifts, commissions, rebates, or other forms to Employees or Officers of PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero).



Persyaratan Penyedia

Supplier Requirement

2. Kualifikasi Penyedia

Penyedia dikelompokkan berdasarkan :

- Kualifikasi Penyedia sebagaimana tercantum dalam Nomor Induk Berusaha atau dokumen yang dipersamakan;
- Modal Usaha;
- Pengalaman;
- Produsen atau Original Equipment Manufacturer (OEM) atau Distributor Resmi.

2. Supplier Qualification

Suppliers grouped based on:

- Qualifications of the Supplier as stated in the Business Identification Number or equivalent document;
- Business Capital;
- Experience;
- Manufacturer or Original Equipment Manufacturer (OEM) or Authorized Distributor or Authorized Agent.



Persyaratan Penyedia

3. Hak Asasi Manusia

Setiap Penyedia wajib menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam setiap proses bisnis yang dilakukan, mencakup tidak terbatas pada :

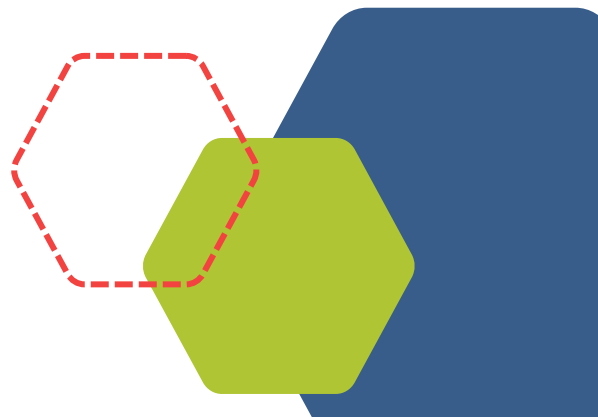
- Hak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya;
- Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan;
- Hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati Nurani;
- Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;
- Perempuan dan laki-laki berhak atas kehidupan dan kemerdekaan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Supplier Requirement

3. Human Right

Each Supplier is required to uphold Human Rights in every business process carried out, including but not limited to:

- The right to embrace religion and worship according to their religion;
- The right to live and maintain life;
- The right to freedom of mind and conscience;
- Right to decent work and livelihood;
- Women and men have the right to life and freedom from discriminatory treatment on any basis and are entitled to protection against discriminatory treatment.



Persyaratan Penyedia

4. Aspek Keteganakerjaan

Setiap Penyedia wajib mematuhi ketentuan Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain :

- Menjamin untuk melindungi hak-hak karyawan tidak terbatas pada Upah, Jaminan Kesehatan, Jaminan Hari Tua, Jam Kerja dan hal lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan;
- Mendukung kesetaraan gender dalam lingkungan kerja;
- Tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur 18 tahun.

Supplier Requirement

4. Responsible Employment

Each Supplier is required to comply with the provisions of Manpower by the laws and regulations, including:

- Guarantee to protect the rights of workers/workers not limited to Wages, Health Insurance, Old Age Security, Working Hours, and other matters regulated in Manpower laws and regulations;
- Supporting gender equality in the work environment;
- Do not employ employees under the age of 18 years.



Persyaratan Penyedia

5. Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH)

Setiap Penyedia wajib mematuhi ketentuan K3LH sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Kerahasiaan Data

Setiap Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyimpan, melindungi dan mengamankan semua Informasi Rahasia yang kriterianya akan ditentukan dalam Kontrak antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dengan Penyedia.

7. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Penyedia dalam memberikan layanan Barang/Jasa wajib mengutamakan produk dalam negeri dalam upaya mendukung Kebijakan Pemerintah dalam hal Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Supplier Requirement

5. Occupational Health & Safety

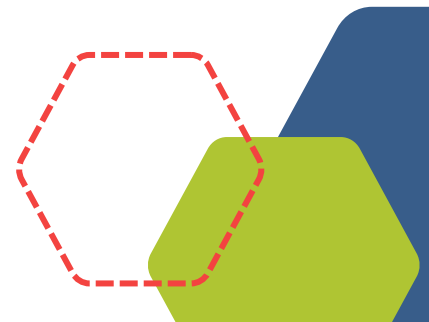
Each Supplier is required to comply with K3LH provisions by the laws and regulations.

6. Data Confidentiality

Each Supplier is obliged to take the necessary steps to store, protect and secure all Confidential Information whose criteria will determine in the Contract between PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) and the Supplier.

7. Increased Use of Domestic Products

Suppliers providing goods/services must prioritize domestic products to support Government Policy in terms of Increasing the Use of Domestic Products.



Persyaratan Penyedia

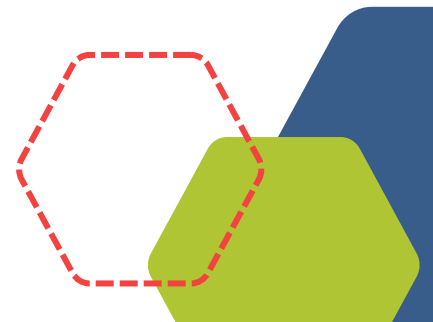
Supplier Requirement

8. Jaminan Pekerjaan

- Penyedia menjamin bahwa Barang/Jasa yang disediakan tidak diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum, serta tidak dibebani dengan hak-hak pihak lain yang dapat menghambat/mengganggu penyerahan Barang/Jasa;
- Penyedia menjamin bahwa Barang/Jasa yang disediakan tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dimiliki pihak ketiga;
- Penyedia menjamin bahwa Barang/Jasa yang disediakan tidak berasal dari negara-negara Konflik yang terdaftar dalam Conflict Affected and High-Risk Areas (CAHRA).

8. Job Guarantee

- The supplier guarantees that the goods/services provided are not obtained in a way that is contrary to the law, and not burdened with the rights of other parties that can hinder/disturb the delivery of the goods/services;
- The supplier guarantees that the goods/services provided do not violate the Intellectual Property Rights (IPR) owned by third parties;
- The supplier guarantees that the goods/services provided do not come from conflict countries listed in the Conflict-Affected and High-Risk Areas (CAHRA).



Persyaratan Penyedia

9. Konflik Kepentingan

Penyedia menjamin bahwa Penyedia tidak memiliki benturan kepentingan dengan Karyawan atau Direksi atau Komisaris atau Pemegang Saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero).

10. Pengalihan Pekerjaan

Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Pekerjaan tanpa persetujuan tertulis dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero).

Supplier Requirement

9. Conflict of Interest

The Supplier guarantees that the Supplier does not have a conflict of interest with the Employees, Directors, Commissioners, or Shareholders of PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero).

10. Job Switching

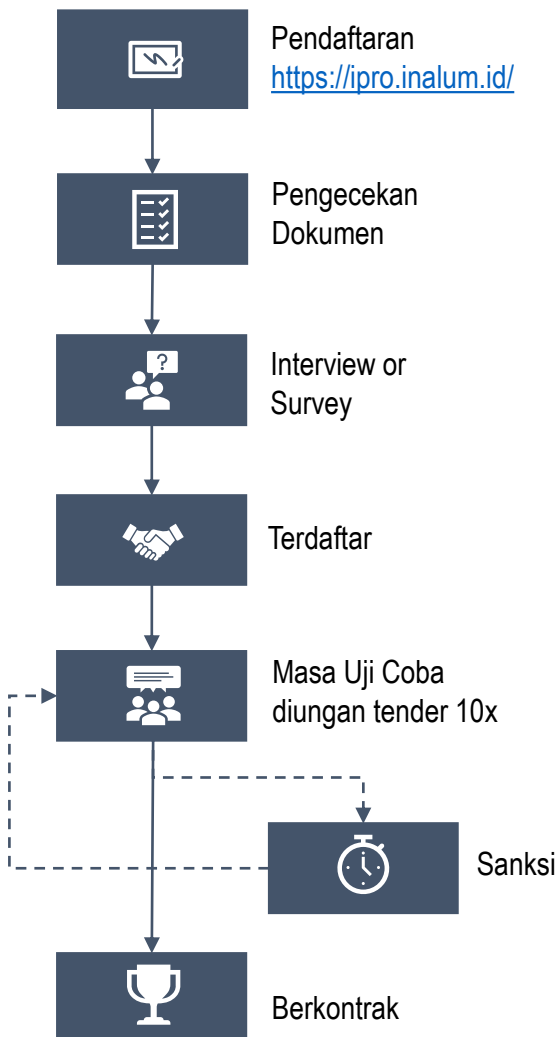
The Supplier is prohibited from transferring part or all of the Works without the written approval of PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero).



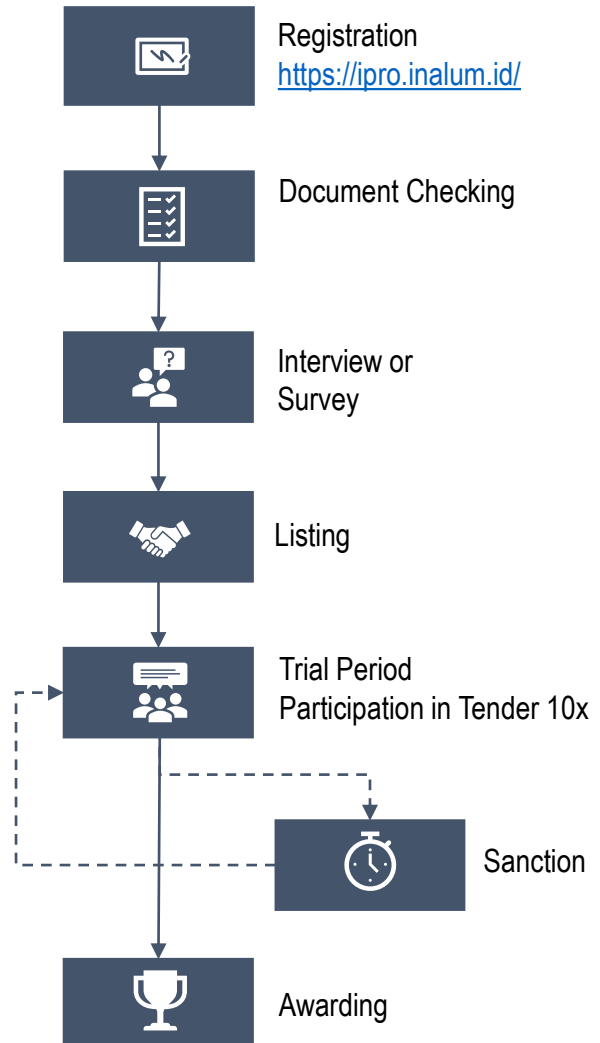
Persyaratan Penyedia

Supplier Requirement

11. Alur proses pendaftaran Penyedia



11. Supplier Registration Process



Sanksi Penyedia

Sanksi Administratif adalah sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa berupa larangan ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa (suspended) di seluruh lokasi PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dengan masa berlaku tertentu, yang terdiri dari :

1. Pelanggaran Ringan

Penyedia tidak diikutsertakan dalam proses pengadaan barang/jasa (suspend) selama 2 bulan.

Rincian pelanggaran:

- Ketidakmampuan Penyedia menyelesaikan sebagian pekerjaan atau mensuplai sebagian barang (wanprestasi) yang tidak berdampak signifikan atau tidak mengakibatkan gangguan kegiatan operasi sampai batas waktu yang ditetapkan atau menyatakan barang tidak diproduksi lagi/discontinued tanpa dilengkapi surat keterangan atau bukti otentik dari maker/distributor resmi/website sebelum dan/atau setelah kontrak ditanda tangani.

Sanction To Supplier

Administrative Sanctions are sanctions to Goods/Services Suppliers in the form of a ban on participating in the process of procurement of goods/services (suspended) in all locations of PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero) with a certain validity period, which consists of:

1. Minor Violation

Supplier can't be invited to the procurement process of goods/services for two months.

Details:

- Suppliers unable to complete part of the work or supply part of the goods. However, this does not have a significant impact or does not result in disruption of operational activities until the specified time limit. In addition, suppliers' states that the goods no longer produced/discontinued without being accompanied by a statement from the official maker/distributor/website before and/or after the contract is signed.



Sanksi Penyedia

- Mengundurkan diri atau menyatakan ketidakmampuan suplai sejumlah item setelah memenangkan tender pengadaan barang/jasa, namun belum tanda tangan kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK), kecuali disebabkan oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero).
- Penyedia yang tidak membayarkan sanksi sewa Gudang yang dikenakan Perusahaan terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat penagihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero).

2. Pelanggaran Sedang

Penyedia tidak diikutsertakan dalam proses pengadaan barang/jasa (suspend) selama 4 bulan.

Rincian pelanggaran:

- Mengundurkan diri setelah memenangkan tender dan telah tanda tangan Surat Perintah Kerja (SPK) baik sudah maupun belum tanda tangan kontrak pengadaan barang/jasa.
- Ketidakmampuan Penyedia mensuplai seluruh barang atau menyelesaikan seluruh pekerjaan yang tidak berdampak signifikan atau tidak mengakibatkan gangguan kegiatan operasi sampai batas waktu yang ditetapkan.

Sanction To Supplier

- Resigned or declared the inability to supply several items after winning the tender (awarding) and suppliers had not signed the contract/Letter of Intent (LOI) unless it caused by PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero).
- Suppliers don't pay the warehouse rent fine.

2. Medium Violation

Supplier can't be invited to the procurement process of goods/services for four months.

Details:

- Withdraw after winning the tender and have signed the Letter of Intent (LOI) whether or not they have signed the contract for the procurement of goods/services.
- Supplier is unable to supply all goods or complete all work. It does not have a significant impact or does not result in disruption of operations until the specified time limit.
- The Supplier does not make payments or other sanctions imposed by the Company based on the Audit Finding.



Sanksi Penyedia

- Tidak melakukan pembayaran atau sanksi lainnya yang dikenakan Perusahaan berdasarkan hasil temuan Audit.

3. Pelanggaran Berat

Penyedia tidak diikutsertakan dalam proses pengadaan barang/jasa (suspend) 6 bulan. Rincian pelanggaran:

- Ketidakmampuan Penyedia menyelesaikan pekerjaan atau mensuplai barang yang berdampak signifikan atau dapat mengakibatkan gangguan operasi atau kegiatan proyek/investasi sampai batas waktu yang ditentukan.
- Apabila Penyedia terbukti tidak melakukan pembayaran upah/gaji, iuran BPJS dan kewajiban lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan atau Kontrak kepada Karyawan Penyedia atau berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Penyedia dinyatakan bersalah.

4. Daftar Hitam

Tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Perusahaan untuk selamanya.

Rincian pelanggaran

- Melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) atau terbukti telah melakukan penyuapan dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk gratifikasi.

Sanction To Supplier

3. Serious Violation

Supplier can't be invited to the procurement process of goods/services for six months.

Details:

- The supplier is unable to complete the work or supply goods that have a significant impact or can disrupt operations or project/investment activities until the specified time limit.
- If the Supplier is proven not to have paid wages/salaries, Social Security Agency of Health, and other obligations by the Legislation or Contracts to the Employees of the Supplier or based on the decision of the Industrial Relations Court, the Supplier is declared guilty.

4. Blacklist

Supplier can't be invited to the procurement process of goods/services forever.

Details:

- Perform acts of Corruption, Collusion, and Nepotism or are proven to have bribed in the process of procuring goods and services, including gratuities.



Sanksi Penyedia

- Penyedia masuk daftar hitam di lembaga Pemerintah, BUMN, Anak Perusahaan BUMN atau perusahaan afiliasi BUMN.
- Melakukan tindakan yang menyebabkan stop operasi, dan/atau hilangnya nyawa manusia, dan/atau merusak lingkungan.
- Melakukan pemalsuan atau pengubahan dokumen resmi atau manipulasi data yang terkait proses pengadaan barang dan jasa.
- Melakukan pekerjaan atau Penyediaan barang fiktif (barang tidak ada).
- Terlibat tindakan pidana yang berhubungan dengan penegak hukum.
- Tidak membayar pajak (PPN) ke kantor pajak yang sudah dibayarkan oleh Perusahaan.
- Terbukti melakukan persekongkolan atau melakukan pengaturan penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa dengan penyedia jasa lainnya/ atau Karyawan Perusahaan.
- Penyedia atau Pengurus Penyedia terbukti melakukan penghasutan pihak lain untuk melakukan tindakan demonstrasi atau pengrusakan fasilitas milik Perusahaan.
- Penyedia dinyatakan pailit.

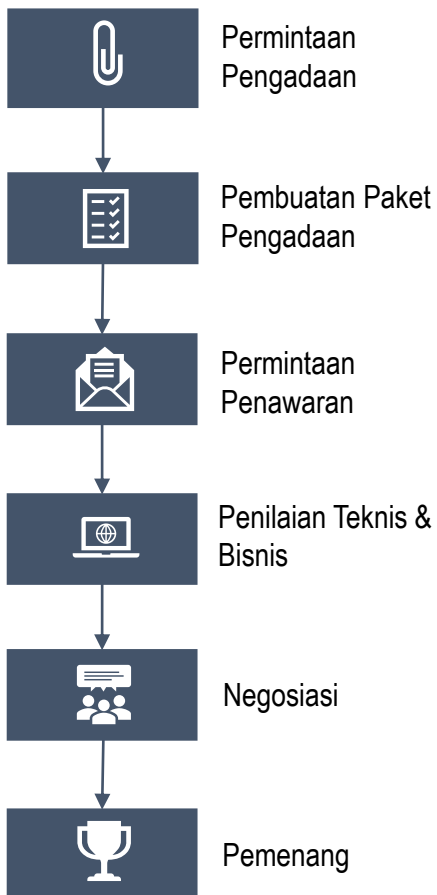
Sanction To Supplier

- Blacklisted by Government institutions, BUMN, BUMN Subsidiaries, or BUMN affiliated companies.
- Suppliers cause the operation to stop, and/or the loss of human-life, and/or damage to the environment.
- Perform falsification or alteration of official documents or manipulation of data related procurement process.
- Doing work or Provision of fictitious goods (non-existent goods).
- Engage in criminal acts related to law enforcement.
- Not paying the taxes (VAT).
- Proven to conspire or arrange bids in procurement process goods/services with other service suppliers/or Company employees.
- The Supplier or Supplier Management is proven to have instigated another party to carry out demonstrations or damage to the Company's facilities.
- The supplier is declared bankrupt.



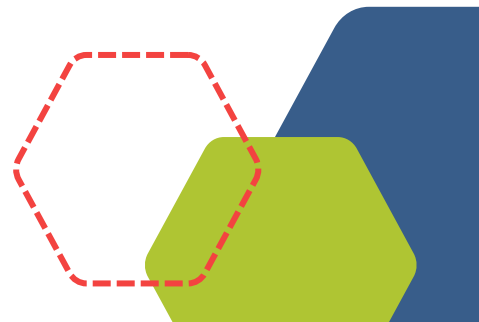
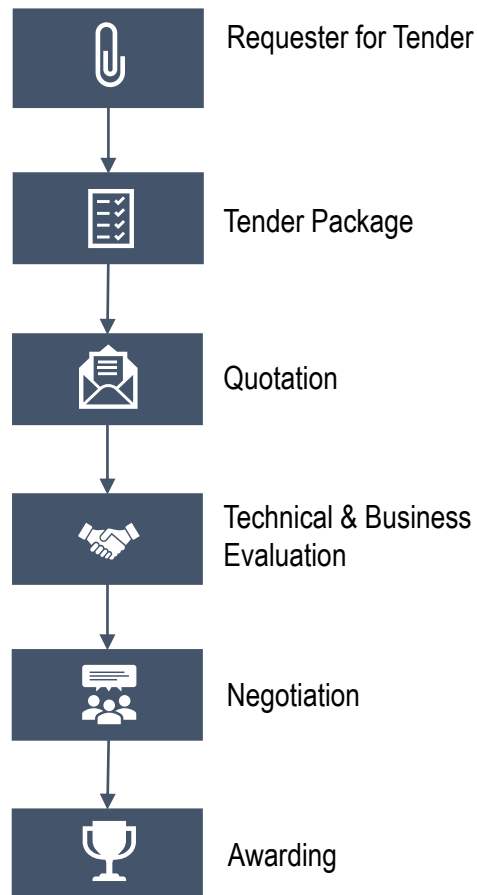
Proses Pengadaan

1. Alur Proses Pengadaan



Procurement Process

1. Procurement Process



Proses Pengadaan

2. Metode Pengadaan

- Pengadaan Langsung

Cara pembelian Barang/Jasa yang terdapat di pasar termasuk e-marketplace.

- Penunjukan Langsung

Cara pengadaan yang dilakukan dengan cara menunjuk langsung Penyedia berdasarkan kriteria Tertentu.

- Tender/Seleksi Terbatas

Cara pengadaan yang dilakukan dengan cara membandingkan minimal 2 (dua) penawaran.

- Tender/Seleksi Umum

Cara pengadaan yang dapat diikuti secara terbuka oleh semua Penyedia yang memenuhi syarat prakualifikasi yang telah diumumkan melalui media massa, website dan/atau papan pengumuman Perusahaan.

3. Metode Evaluasi

- Sistem Gugur

Dilakukan dengan memeriksa kesesuaian dokumen penawaran dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, dimana penawaran yang tidak memenuhi ketentuan dinyatakan gugur

- Passing Grade

Dilakukan dengan memberikan nilai untuk penawaran administrasi dan teknis, kemudian membandingkannya dengan nilai minimum yang telah ditetapkan.

Procurement Process

2. Procurement Method

- Direct Purchase

How to purchase goods/services on the market including e-marketplace.

- Direct Appointment

The procurement method to direct appointment-specific suppliers based on certain criteria.

- Restricted Tender

The procurement method by comparing minimum of 2 (two) offers.

- Open Tender

The procurement method that can be followed openly by all Suppliers who meet the pre-qualification requirements that announced through the mass media, Company website and/or bulletin board.

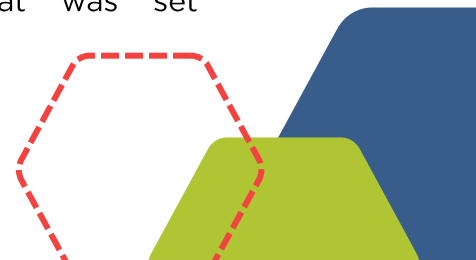
3. Tender Evaluation Method

- Pass/No Pass

Checking the suitability of the bid documents with the conditions set out in the Procurement Documents, where bids that do not meet the conditions are declared void.

- Passing Grade

Providing a value for administrative and technical offers, then comparing it with the minimum value that was set before.



Proses Pengadaan

4. Metode Negosiasi

- Tunggal

Negosiasi dilakukan kepada satu penyedia.

- Jamak

Negosiasi dilakukan kepada lebih dari satu penyedia pada waktu yang sama.

5. Evaluasi

Evaluasi kinerja Penyedia dilakukan untuk setiap kontrak/pekerjaan yang telah selesai dan setiap tahunnya. Hasil evaluasi kinerja menjadi referensi bagi PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dalam mengundang Penyedia untuk proses pengadaan Barang/Jasa. Evaluasi kinerja Penyedia dilakukan terhadap: Waktu Pengiriman, Penyelesaian Pekerjaan, Wanprestasi, Kualitas Barang/Jasa, dan K3LH.

Procurement Process

4. Negotiation Method

- Single

Negotiations are carried out with one supplier.

- Auction

Negotiations are carried out with more than one supplier at the same time.

5. Evaluation of work

Performance evaluation of the Supplier is carried out for each completed contract/work annually. The results become a reference for PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) in inviting Suppliers to process goods/services procurement. Supplier performance evaluation based on Delivery Time, Work Completion, Default, Quality of Goods/Services, and Occupational Health, Safety, and Environment.





PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO)

Kantor Pusat Pabrik Peleburan, Kuala Tanjung
Kuala Tanjung. Kecamatan Sei Suka 21657.
Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara, Indonesia
P.O. BOX 1 Kuala Tanjung
Telp: (+62622) 31311
Fax: (+62622) 31001
e-mail : pengadaan-adm@inalum.id